



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 918/I/VIII/2016



**DPR RI minta Kembangkan Wisata
Berbasis Kearifan Lokal**

**Menteri yang Dipilih
Sudah Cukup Tepat**

**Tiga Hal Jadi Penghambat
Tak Tercapainya Target
Penerimaan Pajak 2015**

GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau Obyek Wisata Goa Kreo di Semarang

DPR RI minta Kembangkan Wisata Berbasis Kearifan Lokal

Obyek wisata Goa Kreo menjadi primadona dari obyek wisata di Kota Semarang, Jawa Tengah. Primadona, karena bentuknya yang sangat indah dan mengesankan. Seperti adanya kera (monyet) ekor panjang yang masih liar, keindahan bagian kawasan waduk buatan Jatibarang dan jembatan penyeberangannya serta keindahan matahari ketika sunset tiba.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (F-PKS) kepada pers disela-sela peninjauan ke Goa Kreo, Semarang, Jum'at (22/7).

"Pariwisata menjadi salah satu komoditas perekonomian yang terus berkembang untuk menyokong keuangan Indonesia, bisa dilihat dari jumlah wisatawan asing yang berdatangan ke Indonesia, dan ini menjadi bukti majunya sektor pariwisata di republik ini," ungkap politisi F-PKS.

Terkait dengan hal tersebut, ia berharap agar pariwisata berbasis kearifan lokal Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Menurut politisi asal Dapil Jateng IX, Indonesia memiliki sebuah eksotisme alam yang berharga. Ia memberi contoh, tidak banyak wisata di dunia yang menyuguhkan alam lengkap dengan kehidupan asli monyet seperti yang disaksikan sekarang ini di Goa Kreo, Semarang.

"Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara, karena keunikan ekosistem itu tidak ada di negara lain selain di Indonesia," ujarnya.

Di Inggris kalau mau melihat monyet hanya di kebun binatang. "Itu kata mereka lho, turis yang datang kesini (Goa Kreo). Jadi ketika mereka datang ke Goa Kreo mereka heran dan merasa takjub," ungkap Fikri seraya menambahkan ini peluang buat kita untuk mengembangkan wisata.

Kekayaan yang ada di Indonesia tidak terkecuali Jawa Tengah, menurutnya, merupakan modal awal untuk bisa membuat sebuah sosioentrepreneur. Kebudayaan, alam, lingkungan bahkan pola hidup masyarakat mampu untuk dijadikan destinasi pariwisata.

Sementara aktivis pariwisata Jawa Tengah, Yos mengatakan bahwa Jawa Tengah mempunyai potensi untuk memiliki banyak destinasi wisata alam yang sekaligus menyuguhkan budaya dan keanggunan masyarakat.

Selain itu, sambungnya, infrastruktur untuk menunjang pariwisata harus terus diperbaiki oleh pemerintah atau swadaya masyarakat.

"Jadi banyak masyarakat yang sudah sadar akan potensi wisata daerahnya. Tapi masih kesulitan dalam promosi wisata, jadi belum banyak yang tahu kalau disitu ada wisata," ungkapnya.

Goa Kreo merupakan wisata alam dan sejarah di Kota Semarang, berlokasi diatas bukit dan seolah menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk empat koloni monyet. Goa Kreo berpadu dengan Waduk Jatibarang yang selesai dibangun pada tahun 2013 dan tidak hanya menjadi wisata alam yang menyediakan pemandangan landscape perbukitan dan pohon, akan tetapi juga perpaduan air dan bumi.

Usai berkunjung ke Waduk Jatibarang dan Goa Kreo, Tim Kunspek Komisi X melanjutkan peninjauan ke kompleks Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang. ■

DPR RI Nilai Wajar Pelaksanaan APBN 2015 Kurang Optimal

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, kurang optimalnya pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015, dinilai wajar. Hal itu disebabkan karena APBN 2015 berada dalam masa transisi pemerintahan baru dengan sebelumnya.

“Sehingga sangat wajar bila ada beberapa hal yang belum terlalu optimal. Hal itu ditambah dengan situasi perekonomian global yang kurang bersahabat,” kata Taufik usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/07). Paripurna beragendakan salah satunya terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-fraksi DPR RI mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2015.

Menurut Taufik, situasi transisi di pemerintahan manapun, membuat program-program tidak dapat berjalan optimal. Meski demikian, dia berharap agar ada optimalisasi fungsi dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI yang merupakan auditor negara.

“APBN 2015 merupakan titik awal pemerintahan baru. Namun hal itu masih dapat diperbaiki dalam APBN 2017 dan juga pelaksanaan Tax Amnesty, yang membuat pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain bekerja keras,” ujar politisi F-PAN itu.

Sebab, kata Taufik, semua instrumen sudah ada dan tersedia. Antara lain kemudahan defisit penerimaan negara maupun instrumen untuk optimalisasi penerimaan pajak. Selain itu, penggunaan uang negara yang selalu dievaluasi oleh BPK dan menjadi salah satu tolak ukur akuntabilitas dan transparansi publik.

“Kita berharap, hal itu bukan hanya

untuk kepentingan pemerintah saja namun juga kepentingan rakyat. APBN 2017 bisa meningkatkan hal-hal yang menjadi program prioritas pemerintah,” tandasnya.

Secara prinsip, lanjut Taufik, dalam pertanggungjawaban APBN, harus dirujukan kepada hasil audit BPK sebagai



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

auditor negara. Sekarang, tinggal bagaimana proses audit BPK itu diperkuat untuk ditindaklanjuti dalam bentuk UU. Dia juga menegaskan, pemerintah harus menindaklanjuti hasil temuan BPK. Hal itu agar tidak menimbulkan kontroversi lagi.

“Jadi, baik diminta maupun tidak diminta. Apabila ada indikasi temuan, akan ditindaklanjuti secara hukum,” jelasnya.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, adanya *Tax Amnesty* juga diharapkan bisa memberikan dukungan optimal kepada Pemerintah dalam hal

penerimaan perpajakan.

“Sedangkan pandangan fraksi ini nantinya bisa diwujudkan dalam bentuk UU. Seluruh fraksi menerima dalam bentuk UU Pertanggungjawaban APBN 2015. Secara keseluruhan, dalam proses pandangan fraksi tidak ada yang keberatan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk UU,” imbuhnya.

Sementara, pemerintah menyambut baik persetujuan seluruh fraksi DPR RI untuk membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015 pada tahap selanjutnya.

“Hal itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada semua fraksi di DPR RI. Khususnya atas pandangan, pendapat, masukan, saran maupun apresiasi kepada pemerintah,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro saat menyampaikan tanggapan pemerintah dalam rapat paripurna tersebut.

Menurutnya, berbagai hal yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut, akan menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah. Khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara.

“Adapun terkait situasi perekonomian global yang kurang bersahabat pada saat itu, tak lepas dari moderasi yang ditandai dengan stagnasi pertumbuhan beberapa negara maju. Selain itu, ada juga pelambatan di negara mitra dagang utama,” tegasnya.

Hal lainnya yang memengaruhi pelambatan kinerja perekonomian domestik adalah harga komoditas global yang relatif rendah. Sehingga memberikan dampak negatif terhadap kinerja perekonomian nasional. ■

(cf. cc), Foto: Arif/for

BULETIN PARLEMENTARIA



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL** **KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN** **REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Ariandinya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Illham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE, M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

[ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN]

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto Terima Dubes Hongaria

Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto menerima kunjungan Duta Besar Hongaria untuk Indonesia HE. Judit Nemeth-Pach, dalam rangka mempererat hubungan kerjasama kedua parlemen antara Indonesia dan Hongaria, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/07).

“Parlemen Hongaria ingin mengundang saya untuk datang ke Hongaria. Karena itu kita perlu melaksanakan pembicaraan hal-hal apa yang harus kita persiapkan dan laksanakan disana,” ujar Agus Hermanto.

Dia memperkirakan waktu pelaksanaannya sekitar bulan Oktober, namun akan disesuaikan kembali mengingat banyak kesibukan dan kegiatan yang harus dilakukan sebagai Wakil Ketua DPR RI.

“Tetapi pertemuan kedua parlemen ini memang sangat kita harapkan, supaya persahabatan kedua parlemen antara DPR RI dengan



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto bersama Dubes Hongaria

parlemen Hongaria bisa terjalin dengan baik dan kita bisa saling meningkatkan kerjasama. Terutama dalam meningkatkan

juga pendidikan. Bahkan belum lama ini Hongaria memberikan 50 beasiswa penuh bagi pelajar Indonesia. ■

perdagangan, turis, dan pendidikan. Yang jelas kita ingin meningkatkan hubungan antara kedua pihak ini supaya menjadi lebih kuat,” ucapnya.

Indonesia adalah mitra penting bagi negara Hongaria, kerjasama antara Indonesia dan Hongaria terjalin dalam banyak bidang, seperti ekonomi, pengolahan air bersih, energi matahari, pertanian,

depmpj, Foto: Arif/br



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Tindak Tegas Pemalsu Kartu BPJS

Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto menyatakan pemalsuan BPJS merupakan perbuatan melanggar hukum, dan para pelakunya harus diberikan sanksi tegas.

“Tindakan pemalsuan BPJS merupakan perbuatan melanggar hukum, dan hal ini harus ditindak dengan tegas. Kita bisa bayangkan program BPJS adalah program yang dulu kita kuatkan, saya juga termasuk dalam tim Pansus yang membahas Undang-undangnya,” tandas Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/07).

Politisi F-Demokrat itu juga meminta agar dilakukan upaya pemberantasan yang serius untuk mengatasi masalah tersebut. “Yang melanggar hukum harus ditindak, pelanggaran ini telah membuat kita semua tercengang, padahal kalau kita lihat hasilnya juga tidak besar. Saya

merasa prihatin kepada saudara-saudara kita yang tergantung pada BPJS tetapi tidak bisa mendapatkan pelayanan karena BPJS nya palsu," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa aturan hukum harus ditegakkan, bagi yang

melanggar harus dikenakan sanksi karena termasuk dalam pelanggaran pidana, kondisi ini membuat keadaan menjadi tidak menentu, padahal BPJS sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Ini memang kejadian yang tidak disangka-sangka, kita harus membuat

antisipasi agar masalah ini tidak terulang kembali, dan kita juga harus dapat melihat berbagai kemungkinan mengenai hal apa saja yang bisa mengganggu jalannya BPJS ini," pungkasnya. ■

(dep.mp) Foto: Arief/br.

Ketua DPR RI Sarankan Penguatan Ombudsman Melalui Alur AKD

Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan jajaran Komisioner Ombudsman RI, dalam pertemuan ini Ketua Komisioner Amzulian Rifai meminta dukungan DPR RI dalam penguatan kewenangan Ombudsman RI.

Menyambut maksud tersebut Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI secara eksplisit dan tidak berbelit-belit mendukung eksistensi serta penguatan lembaga pengawas pelayanan publik ini. Namun yang menjadi catatan penting dalam pertemuan ini adalah semua alur mekanisme penguatan Ombudsman harus melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang berwenang. "Saya sepakat eksistensi Ombudsman harus ditingkatkan. Maksimal dalam penyelenggaraan

negara. Saya sepakat," ujar Akom menyambut maksud yang disampaikan Amzulian, di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Selasa (26/7).

Sebelumnya Amzulian mengungkapkan kendala yang dialami oleh lembaga yang dia ketuai. Banyaknya aduan masyarakat terkait dengan masalah pelayanan publik tidak mendapatkan *feedback* dengan maksimal, karena Ombudsman hanya bisa memberi

rekomendasi kepada pemberi layanan. Selanjutnya tidak ada kewajiban yang mengikat untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

Komisi II dan Badan Legislasi DPR RI. Adapun untuk usulannya, Akom menjabarkan bisa melalui inisiatif DPR RI atau bisa juga melalui inisiatif pemerintah.

"Kalau dari segi UU mitranya Ombudsman kan di Komisi II. Kalo komunikasinya bagus dengan Komisi II semua akan berjalan dengan lancar. Ini tergantung hasil kesepakatan Komisi II," jelas Akom.

Akom menyarankan untuk memperlancar maksud dan tujuan dari para jajaran Komisioner Ombudsman RI, agar menjalin komunikasi politik secara baik dengan AKD yang berwenang. "Keputusan semua tergantung pada

Alat Kelengkapan Dewan, tidak boleh ada yang dilangkahi," ujarnya menyarankan.

Akom menyadari penguatan lembaga ini penting, karena kalau kewenangan Ombudsman lemah maka kinerjanya pun akan mubazir. Dia tidak berkehendak adanya lembaga ini seperti ketiadaannya, yang dalam ungkapan bahasa Arab "*wujudibi ka adamibi*," imbuh Mantan Ketua BP HMI Priode 1993 - 1998. ■

(abo) Foto: Kumi/br.



Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan jajaran Komisioner Ombudsman RI

"Pelayan publik tolak ukurnya pada laporan masyarakat. Sedangkan kita hanya bisa memberi rekomendasi. Sehingga lembaga ini membutuhkan *support* dari Komisi II dan dari Bapak Ketua secara kelembagaan," ujar Amzulian kepada Akom.

Menanggapi hal tersebut Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, bahwa untuk menindaklanjuti kepentingan tersebut secara struktur kelembagaan DPR RI, ada dalam ruang lingkup kewenangan

DPR RI Akan Buat Payung Hukum Pertahanan Negara

Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima kunjungan Sekjen Kementerian Pertahanan RI Laksamana Madya TNI Widodo, dalam rangka membahas masalah pembuatan dasar hukum bagi institusi keamanan negara.

“Sekjen Kemenhan bersama dengan jajarannya mengirim surat kepada saya untuk menyampaikan pandangannya menyangkut berbagai rencana Kementerian Pertahanan untuk membuat institusi intelejen pertahanan, atase pertahanan, Fakta Perwakilan Pertahanan, dan lainnya, dengan berbagai dasar hukum yang memang ada,” ujar Ade Komarudin usai petemuan di Gedung DPR RI, Senin (25/7).

Ia juga menyampaikan tentang hasil diskusinya dengan Komisi I dan Badan Anggaran, yang kemudian disimpulkan bahwa sebaiknya DPR RI membuat payung hukum (Umbrella Legislation) dibidang pertahanan negara, supaya bisa mengatur seluruh institusi yang bertanggungjawab atas keamanan negara ini.

“Semua institusi yang bertanggungjawab atas keamanan negara, masing-masing punya Undang-undang yang menjadi dasar hukum. Tetapi kita harus buat 'Umbrella Legislation' atau



Ketua DPR RI Ade Komarudin

payung hukumnya, supaya kebijakan-kebijakan keamanan dan pertahanan negara ini dapat terkondisi dengan baik dan semuanya tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah DPR RI akan membuat Undang-undang inisiatif tentang payung hukum yang terkait dengan institusi keamanan negara, yang tujuannya agar bisa menyelesaikan berbagai masalah terkait secara elegan, serta memuaskan semua pihak, dan pertahanan negara dapat terjamin dengan baik.

“Kita harus payungi semua itu dalam bentuk Undang-undang Keamanan negara dan keamanan nasional,” tandas pria yang akrab disapa Akom tersebut. ■

(dep.mpf), Foto: Jeyati/br

Menteri yang Dipilih Sudah Cukup Tepat

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengadakan jumpa pers di ruang Media Center DPR RI, terkait Reshuffle Kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Reshuffle Kabinet tersebut adalah Hak Prerogatif Presiden dan Wakil Presiden.

“Presiden dan Wakilnya memilih para Menteri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka berdualah yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan penilaian. Para Menteri yang terpilih sudah cukup tepat, sebab yang paling tahu soal para Menteri itu adalah Presiden dan Wapresnya,” ujar Ade Komarudin, Rabu (27/07).

Ia juga menjelaskan bahwa tugas para Menteri sesuai dengan UUD adalah sebagai pembantu Presiden, oleh karena itu yang paling paham dan mengerti, serta berwenang untuk mencopot atau tidak mencopot posisi Menteri tersebut adalah Presiden dan Wapres. Sebab yang



Suasana jumpa pers Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama sejumlah Wartawan

bertanggungjawab terhadap rakyat Indonesia adalah Presiden dan Wakilnya yang dipilih oleh rakyat. Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan Parlemerter melainkan sistem

pemerintahan Presidensial, jadi yang bertanggungjawab adalah Presiden dan Wapres, yang dibantu oleh para Menteri. Kalau sistem pemerintahan Parlemerter mungkin saja komposisinya sesuai dengan perolehan suara.

“Sebenarnya dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden dapat memilih para Menteri. Baik dari partai politik atau dari kalangan profesional, ini artinya semua kewenangan ada padanya.

Yang jelas, meskipun tidak mampu mengakomodir secara politik, tetapi secara proporsional tetap dapat dipertanggungjawabkan,” pungkask pria yang disapa Akom itu. ■

(dep.mpf), Foto: Jeyati/br

Waduk Bendo Diharapkan Mampu Perbaiki Kualitas Pangan

Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo yang kini sedang dibangun diharapkan mampu meningkatkan kualitas tanaman pangan. Waduk ini kelak akan mengairi 73 ribu hektar sawah di Ponorogo.

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI melihat langsung waduk ini di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Ponorogo. Waduk ini dibangun untuk pengembangan sumber daya air, baik irigasi, air baku domestik, dan industri pengendalian banjir.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menyambut baik pembangunan waduk ini saat meninjau langsung di lokasi, Jumat (22/7). Pekerjaan selanjutnya tinggal memperbaiki infrastruktur saja menuju waduk tersebut. Ini memang



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Waduk Bendo di Ponorogo

butuh dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI.

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni

menjelaskan, waduk ini memiliki kedalaman 21 m dengan konstruksi tahan hingga 100 tahun. Diharapkan akhir 2017 waduk ini rampung dibangun.

Ditambahkan Bupati, saat ini baru 30 persen masyarakat Ponorogo yang menikmati air baku. Bila waduk sudah dioperasikan, semua masyarakat bisa menikmati air baku yang baik.

Air waduk ini tidak saja mengairi 60 persen sawah di Ponorogo, tapi juga 40 persen sawah di Madiun. Waduk ini kelak juga bisa dijadikan objek wisata bagi masyarakat sekitar. ■

(mb), Foto: Husen/br

Komisi X Dorong Kemenpar Perkuat Program Peningkatan Wisatawan

Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan penguatan program untuk peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, termasuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata yang berdaya saing di dalam dan di luar negeri. Hal ini terkait program Kemenpar pada RAPBN TA 2017.

Demikian menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah

Pariwisata Arief Yahya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/07). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah.

"Peningkatan keragaman dan daya saing produk atau jasa pariwisata nasional di setiap destinasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional turut menjadi pandangan Komisi X DPR RI kepada Kemenpora dalam pembuatan Nota Keuangan RAPBN TA 2017," jelas Ferdi.

Politisi F-PG itu menambahkan, Komisi X juga mendorong Kemenpar untuk

memprioritaskan alokasi anggaran RAPBN TA 2017 pada program pembangunan daerah atau wilayah penyangga 10 destinasi baru dan sinkronisasi program antara Kemenpar dengan Pemerintah Daerah.

"Kegiatan internasional yang berlangsung di Indonesia seperti Asian Games XVIII Tahun 2018, juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia," imbuh Ferdi.

Sementara terkait pagu anggaran Kemenpar RAPBN 2017, politisi asal dapil Jawa Barat itu memastikan pihaknya belum menyetujui, karena masih perlunya pendalaman lebih lanjut. ■

(sf), Foto: Akbar/br

Pansus DPR RI Setujui RUU Paten

Rapat Pleno Pansus RUU Paten yang dipimpin Ketuanya John Kenedy Aziz didampingi Wakil Ketua Pansus Syarifudin Suding dan Risa Mariska, Selasa (26/7) sore di Ruang Pansus B Gedung Nusantara II Senayan, menyetujui RUU Paten hasil pembahasan Panja untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Pansus juga sepakat naskah RUU Paten ini untuk diteruskan pada proses pembahasan selanjutnya untuk dimintakan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pada Kamis (28/7).

Dalam rapat yang dihadiri Menkumham Yasonna H. Laoly dan Menristekdikti M. Nasir, sepuluh fraksi yang diwakili jubar masing-masing menyampaikan pandangan akhir mini dan menyatakan persetujuan RUU Paten sebagai pengganti UU No 14/2001 untuk disahkan menjadi undang.

Dalam pandangan akhir mini fraksi-fraksi antara lain sepakat pengesahan RUU Paten ini sebagai antisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi,



Penandatanganan Naskah RUU Paten Anggota Pansus dan Pemerintah

sebab RUU sebelumnya belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan permohonan paten dalam negeri. RUU Paten yang lalu belum bisa dimanfaatkan oleh para peneliti baik swasta maupun pemerintah. Pengaturan paten juga belum bermanfaat secara langsung bagi pelaku usaha dan aparat pemerintah sebagai pelaksana UU, sehingga belum bisa menjadi faktor penggerak ekonomi

nasional.

Fraksi-fraksi DPR RI juga mencatat bahwa perkembangan berbagai bidang telah demikian pesat sehingga diperlukan perlindungan bagi para inventor dan pemegang paten. Peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya baik secara kuantitas maupun kualitas guna mendorong kesejahteraan bangsa serta menciptakan iklim

usaha yang sehat.

Sebelum pengesahan, Ketua Panja RUU Paten Syarifudin Suding melaporkan jalannya pembahasan RUU yang terdiri atas 707 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). RUU yang semula terdiri atas 165 pasal dan 19 bab, setelah dibahas DPR RI bersama pemerintah bertambah menjadi 20 bab dan 173 pasal. ■

(mp), foto: Anief/br

Baleg Setujui Revisi UU Pendidikan Kedokteran

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan mayoritas fraksi di DPR RI menyetujui melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok). Salah satu yang menjadi persoalan terkait dengan Dokter Layanan Primer (DLP).

“Kesimpulannya positif, hampir semua Fraksi di Baleg memberikan dukungan revisi UU Dikdok, terutama DLP,” ungkap Supratman saat beraudiensi

dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/07).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum IDI Oetama Marsis menyampaikan terhadap kebijakan pemerintah, diantaranya ialah penyisipan istilah profesi baru yakni Dokter Layanan Primer (DLP) yang dianggap tidak sejalan dengan UU No 29



Ketua Baleg Supratman Andi Agtas bersalaman dengan Ketua Umum IDI

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Alasannya, dokter yang belum memiliki sertifikat DLP tidak bisa melakukan praktik kesehatan kepada masyarakat dan akan memiliki dampak hukum kepada dokter umum yang tetap melayani praktik. Akibatnya, dokter yang tidak bersertifikasi DLP harus melanjutkan pendidikan lagi selama dua tahun.

Sementara itu, anggota Baleg Adang Sudrajat juga menilai dengan dimasukkannya DLP dalam UU Dikdok sangat riskan karena akan mengundang tenaga kerja dokter asing masuk ke

Indonesia. Pertama, DLP akan memperpanjang masa pendidikan. Kedua, para dokter terancam tidak bisa praktik jika tidak mengikuti DLP.

"DLP ini memang pilihan tapi nantinya akan ada restriksi dokter yang tidak memiliki DLP. Itu kan sama saja, kayak dianggap bukan dokter," tegasnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan, adanya regulasi tersebut membuat para dokter akan memperpanjang masa pendidikannya dan secara tidak langsung memperlambat mereka menjadi spesialis. Hal ini dikhawatirkan akan membuka peluang

kepada dokter asing untuk mengisi kekosongan tersebut.

"Ini sangat berbahaya karena akan mengundang orang asing yang akan masuk ke Indonesia. Dokter kita sibuk DLP, sementara dokter asing masuk," imbuh politisi Fraksi PKS itu.

Selanjutnya, Baleg akan mengkaji lebih dalam mengenai UU Dikdok dan akan membentuk Panitia Kerja (Panja). "Baleg akan undang Kemenkes, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan IDI untuk duduk bersama membentuk Panja," ujar Supratman. ■

(ann.mp), Foto: Javab/hr

Panja Pupuk Komisi IV Tinjau Ketersediaan Pupuk di Karawang

Panja Benih dan Pupuk, Komisi IV DPR RI meninjau langsung ketersediaan pupuk sekaligus benih di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kali ini Panja melakukan inspeksi ke PT. Sang Hyang Seri untuk melihat dari dekat ketersediaan benih dalam menyambut musim tanam tahun ini.

Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, saat melihat ketersediaan benih di

Karawang, Rabu (20/7), menjelaskan, ada empat hal yang sedang dipantau, yaitu kualitas benih, produksi, penyaluran, dan penyerapan benih. "Ketersediaan stok benih saat ini sudah mencukupi. Tetapi, yang jadi masalah sering kali terhambat penyalurannya. Kita ingin memastikan di lapangan seluruh penyaluran benih berjalan baik, sehingga tidak menghambat masa tanam," katanya.

Bersama sejumlah anggota Komisi IV, politisi PKB ini ingin memastikan bahwa penyaluran benih bersubsidi ke para petani tidak tersumbat lagi. Penyaluran benih yang tersumbat tentu akan mengganggu siklus masa tanam yang dilakukan para petani. Dan salah satu yang menghambat produksi benih adalah

utang yang ditanggung PT Sang Hyang Seri. Butuh jadwal ulang utang perusahaan ini.



Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan saat melihat ketersediaan benih di Karawang

"Saat ini, sudah ada rescheduling utang selama 10 tahun. Dan akan ada penambahan lagi, sehingga bisa membantu cash flow. Kalau pun ada PMN, itu tidak untuk membayar utang. PMN untuk meningkatkan nilai aset, produktivitas, kinerja agar swasembada pangan bisa tercapai," papar Daniel lagi.

Ditambahkannya, saat ini PT. Sang Hyang Seri sedang mengajukan PMN sebesar Rp 1 triliun untuk memperkuat

kinerja sekaligus meningkatkan nilai asetnya. Ini akan jadi bahan pembahasan di Komisi IV. Minggu depan, sambung Daniel, master plan perusahaan BUMN ini rampung. Komisi IV akan menelaah dengan teliti dan cermat, apakah pengajuan PMN ini mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Tahun depan, sambung Daniel, penyerapan benih bisa berjalan lebih baik sesuai jadwal masa tanam. Benih-benih yang dihasilkan harus sesuai dengan peta iklim dan peta tanah di masing-masing daerah. Bila akhir tahun ini, terjadi La Nina, tentu harus disiapkan benih yang tahan air. ■

(rif.mp), Foto: Arief/hr

BKSAP Gelar Halalbihalal, Silaturahmi dan Tingkatkan Kinerja

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar silaturahmi dengan Pimpinan dan Anggota BKSAP, staf, dan mitra kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat, (22/7). Ketua DPR RI Ade Komarudin pun juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini guna menjalin silaturahmi dan tingkatkan kinerja. "Syukur alhamdulillah pada siang ini BKSAP selenggarakan silaturahmi yang juga dihadiri Ketua DPR RI dan Anggota BKSAP. Kegiatan ini masih dalam rangka halalbihalal. Atas nama



Ketua DPR RI Ade Komarudin dan Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf

BKSAP, saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah, mohon maaf lahir batin," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini pun menuturkan bahwa kegiatan halalbihalal adalah sesuatu yang penting dalam upaya meningkatkan kinerja BKSAP dalam melakukan kerjasama antar parlemen dalam rangka tujuan kesejahteraan rakyat. "Kami ingin silaturahmi ini untuk meningkatkan kinerja BKSAP serta untuk terus tingkatkan kerjasama antar parlemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat," terang Nurhayati.

Nurhayati memaparkan bahwa BKSAP saat ini memiliki dua panitia kerja (Panja), yakni Panja Sustainable Development Goals (SDGs) dan Panja Asean Economic Community (MEA). Panja BKSAP ini memiliki fungsi yang strategis. Ia pun ingin bahwa Indonesia dapat memiliki peran untuk menjadi contoh bagi parlemen negara lain dalam hal keharmonisan dan saling menghargai antar umat beragama.

"Panja di BKSAP ini amat strategis, kami ingin Indonesia dengan penduduk masyarakat muslim terbesar dengan

Bhineka Tunggal Ika dapat berperan menunjukkan hidup saling menghormati antar umat beragama dan harmoni ini menjadi contoh bagi parlemen di negara lain," ujar Nurhayati.

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama ini, ia pun ingin kerjasama yang baik antar parlemen bisa diteruskan. Ia menegaskan bahwa segala yang berurusan dengan luar negeri harus dikoordinasikan melalui BKSAP.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan, jika anggota dewan ingin melakukan kunjungan kerja luar negeri harus jelas tujuannya dan harus memiliki kaitan dengan tugas dan fungsi dewan. Sehingga tidak ada kunjungan luar negeri yang berakhir sia-sia.

"Tanpa ada koordinasi dengan BKSAP, tak boleh ada kunjungan luar negeri. Kunjungan kerja luar negeri harus jelas tujuannya. Kita tak ingin dapat laporan ada kunjungan kerja luar negeri yang tak ada kaitannya dengan urusan pekerjaan dewan," tegas Akom, sapaan akrabnya.

Akom juga menginginkan agar

koordinasi BKSAP dengan mitra kerja seperti Kementerian Luar Negeri dapat terus berjalan baik sehingga tugas dewan dapat dilakukan secara maksimal. "Kita ingin koordinasi ini berjalan dengan baik antara BKSAP dengan Kemenlu serta pimpinan AKD lain. Koordinasi ini diperlukan supaya tugas dewan dapat dimaksimalkan," tuturnya.

Setelah melakukan halalbihalal, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kepala Biro Kerjasama Antar Parlemen, Saiful Islam dan makan siang bersama. Beberapa pimpinan dan anggota BKSAP yang hadir diantaranya Tantowi Yahya, Syaifullah Tamliha, Evita Nursanty, Nazarudin Kiemas, Dwie Aroem Hadiatie, Sareh Wiyono, Andika Pandu Puragabaya, Rita Zahara, Sartono Hutomo, Melani Leimena Suharli, Ahmad Najib Qodratullah. Selain itu hadir pula perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). ■

(b3.mp) / foto: krean6/mr.

“Seandainya ada anak-anak disini terkendala karena tidak memiliki biaya, tolong sampaikan kepada kami. Tentunya akan segera kami tindak lanjuti” kata Politisi PKS dari Dapil Sumatera II dihadapan ratusan anak-anak MAN 2 di Medan, Jum'at (22/7).

Ia menambahkan, beasiswa saat ini memiliki dua jalur, pertama dari pemerintah dan ada yang dari swasta. Hampir rata-rata Anggota DPR RI di Komisi VIII memiliki jaringan beasiswa ke beberapa negara. Sehingga melalui jaringan tersebut bisa dimanfaatkan.

"Yang sudah kerjasama dengan saya adalah Kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI di Depok dan Universitas Sumbawa. Semuanya dibiayai gratis sampai lulus, pokoknya

Sekjen DPR RI Sambut Baik Tawaran Kerjasama Kedubes Belanda

Sekretaris jenderal DPR RI, Winantuningtyas Titi Swasanany menyambut baik tawaran kerjasama Kedutaan besar Belanda kepada DPR RI. Hal tersebut terungkap saat Sekjen DPR RI menerima konsultan politik dari Kedutaan Besar Belanda, Nico Schemer di ruang kerja Sekjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7).

“ Ya kami menyambut baik tawaran dari kedutaan besar Belanda (kementerian luar negeri) yang ingin bekerjasama dengan DPR RI. Karena memang sampai sekarang belum pernah ada MoU (*Memorandum of Understanding*) antara DPR RI dengan Kedubes Belanda. Padahal

Indonesia dengan Belanda memiliki sejarah yang cukup panjang," ungkap Win begitu ia biasa disapa.

Dijelaskan Win, tawaran dari Kedubes Belanda itu diantaranya adalah pertukaran staff DPR RI (lebih cenderung ke Peneliti) untuk mempelajari politik dan hukum di negara tersebut. Bahkan Kedubes Belanda juga akan merekomendasikan ahli hukum terbaik di negerinya, untuk memberikan masukan pada DPR RI dalam penyusunan



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menerima konsultan politik dari Kedubes Belanda

KUHP (kitab undang hukum pidana) yang tengah dibahas di Komisi III DPR RI. Karena sebagaimana diketahui hukum yang ada di Indonesia saat ini merupakan warisan atau produk dari Belanda.

"Tidak hanya akan mempersiapkan para ahli hukum, Kedutaan besar Belanda juga akan memberikan referensi-referensi lainnya yang akan membantu dalam penyusunan KUHP," tambahnya.

Pada kesempatan itu Nico juga mengungkapkan rencana kedatangan Perdana Menteri Belanda ke Indonesia. Salah satu agendanya adalah berkunjung dan bertemu dengan Pimpinan DPR RI, beserta Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan atau permasalahan luar negeri, serta BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), salah satu alat kelengkapan dewan di DPR RI yang membidangi hubungan kerjasama dengan parlemen negara-negara lainnya.

Win yang didampingi oleh Deputi Bidang Persidangan, Damayanti dan Kepala Bagian Sekretariat Komisi I DPR RI, Suprihartini, berharap agar kerjasama tersebut dapat segera terwujud lewat penandatanganan nota kesepahaman atau MoU. MoU inilah yang nantinya akan menjadi payung hukum berbagai bentuk program kerjasama lainnya antara DPR RI dengan Kedutaan Besar (Kementerian luar negeri) Belanda. ■

(Ayu), Foto: Arif/An

Wakil Ketua Komisi VIII Janjikan Beasiswa Kuliah Siswa MAN Medan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan, tidak boleh anak-anak di Madrasah Aliyah Negeri Medan sampai tidak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri karena alasan tidak mampu. Pasalnya, dalam RAPBN 2016 juga akan diperbanyak terkait beasiswa.



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI meninjau MAN 2 Model Medan

saya janji kalian semua masuk ke perguruan tinggi"

Menurut Iskan, ada sekitar 70 Negara yang sudah siap menampung anak-anak yang akan mendapatkan beasiswa seperti di Jeddah, Malaysia dan Turki. Selain itu, anak-anak yang terdaftar disini juga nilainya bagus-bagus,

artinya mereka memang anak yang pintar.

Sementara itu, Kepala Sekolah MAN 2 Medan Burhanuddin mengatakan, lulusan MAN 2 Medan ini sudah hampir diterima diseluruh Perguruan Tinggi Negeri ternama di Indonesia, bahkan tahun lalu ada yang mendapatkan beasiswa ke Jerman dan Mesir. ■

(Ikemp), foto: Jakarta/An

Komisi VIII Setujui Perppu Kebiri Jadi UU

Komisi VIII DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk diajukan pada pembahasan tingkat kedua atau dibahas lebih lanjut dalam paripurna DPR RI untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Tercatat tujuh fraksi yang mendukung agar Perppu yang sering disebut Perppu Kebiri ini menjadi Undang-Undang adalah PDI-Perjuangan, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, PAN dan PKB. Sedangkan fraksi yang belum memberikan sikap adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pernyataan sikap 10 fraksi DPR RI ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Yohana Yembise, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Perwakilan dari Kemenkumham dan Kementerian Agama.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan dengan persetujuan 7 fraksi soal Perppu ini, pihaknya akan membawa ke Sidang Paripurna.

"Ada 7 Fraksi yang menyetujui Perppu ini jadi UU dan 3 Fraksi tidak menyetujui. Secara keseluruhan kami



Penandatanganan Naskah Perppu No. 1/2016 antara Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah

menyambut baik pandangan fraksi. Secara konstitusional, kita dapat menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ini dilanjutkan untuk dijadikan UU," terang Ali, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (26/7).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional ini mengatakan setelah pengesahan di Komisi VIII DPR RI, Pimpinan DPR RI, Fraksi, dan Komisi akan mengagendakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk memutuskan apakah Perppu Kebiri ini akan ditetapkan pada paripurna masa sidang saat ini atau yang akan datang.

"Itu teknis. Secara umum,

substansinya, pokok-pokoknya sudah memenuhi aspek legalitas meski dalam pembahasannya anggota Dewan memberi pandangan agar aturan turunan sesuai hierarki perundang-undangan sesuai aspek sosiologis, historis, legalitas, perlu didalami," kata Ali.

Ia menambahkan setelah Perppu Kebiri ini diundangkan, ia berharap ada koordinasi dengan

pemerintah terkait aspek turunan dari UU tersebut. "Yang paling penting, maka kejahatan seksual sebisa mungkin diminimalkan. Dasar hukum kuat, proses jelas, lembaga punya kompetensi, pemberatan harus jelas," kata Ali.

Soal adanya tiga Fraksi yang tak bersikap, menurutnya, tiap proses pasti ada dinamika. Oleh karena itu, ia menghargai pandangan tersebut. Proses Perppu Kebiri setelah dari Bamus ditetapkan kapan akan dibawa ke Sidang Paripurna. Forum itulah yang akan memutuskan untuk menolak atau menerima Perppu Kebiri ini. ■

(as), Foto: Krened/br

Komisi III Minta Penjelasan Hilangnya Ribuan Kasus di Kepolisian

Komisi III DPR RI mempertanyakan informasi terkait 44 ribu kasus yang hilang di kepolisian, dan tidak dilaporkan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Kabareskrim, Komjen Ari Dono Sukmanto, Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Mochamad Iriawan dan beberapa Kapolda dari beberapa provinsi, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).

“Kami mendapat laporan dari Komnas Ham bahwa ada sekitar empat puluh empat ribu lebih kasus hukum di kepolisian baik di pusat maupun di daerah yang hilang begitu saja, dan tidak sampai kepada JPU. Tolong dijelaskan,” tanya Wakil Ketua Komisi III, Desmond Mahesa.

Senada dengan Desmond, anggota Komisi III lainnya,

Hasrul Azwar juga menilai informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh Polri. Bahkan ia juga berharap Polri dan Komnas HAM perlu berkoordinasi dengan baik terkait kasus tersebut. Hal ini semata untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas, sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dua insitusi.

"Menurut saya Mabes Polri perlu berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk memberikan penjelasan secara rinci tentang informasi dan asal data tersebut, agar masyarakat luas menjadi jelas. Selain itu juga perlu dijelaskan perjalanan sebuah perkara yang masuk ke kepolisian hingga sampai diajukan ke meja hijau atau mendapat putusan hakim. Hal ini sangat penting sebagai pembelajaran masyarakat," ungkap Politisi dari Fraksi PPP ini.

Sementara itu, Kabareskrim Komjen

Ari Dono yang baru menduduki jabatan tersebut menjelaskan bahwa di kepolisian ada tahapan buku laporan perkara dari P1 hingga P19, P21 dan P22. Di tahapan awal laporan perkara akan diseleksi apakah masuk pidana atau bukan. Dan perkara itu kemudian dimasukkan ke bagian masing-masing.

Jika bukan termasuk wewenang kepolisian dijelaskan Ari Dono, perkara tersebut kemudian akan diberikan ke instansi berwenang lainnya. Misalnya perkara keimigrasian. Tahapan-tahapan tersebut menurut Ari tentu membutuhkan waktu

yang tidak sedikit. Pihaknya juga meyakini ketidakbenaran informasi tersebut. Meski demikian ia berjanji akan tetap menjalankan tugasnya dengan baik, sebagaimana yang diamanatkan Polri dan bangsa ini kepada dirinya. Termasuk penyelesaian kasus-kasus lainnya. ■



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Mahesa

(opsi), Foto: Azka/br

Sekjen Gelar Rapat Koordinasi Bahas Sidang Bersama MPR, DPR dan DPD RI

Sekretariat Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany bersama Sekretaris Jenderal MPR RI dan DPD RI menggelar rapat koordinasi. Rapat tersebut membahas tentang mekanisme penyelenggaraan Sidang Bersama dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI yang berlangsung setiap 16 Agustus.

“ Kita membahas rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RI dan HUT DPR RI ke-71. Sejak tahun lalu, ada juga sidang tahunan MPR sehingga dalam satu hari itu ada 3 sidang, karena berlangsung dalam satu hari, tentu ini

harus diatur bersama," kata Win, sapaan akrab Winantuningtyas, di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/07).

Lebih lanjut, Win menjelaskan kegiatan tahunan ini merupakan

implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Dalam ketentuan Pasal 199 dan Pasal 268 dalam UU MD3 mengamanatkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilaksanakan sebelum pembukaan tahun sidang DPR RI dan DPD.

"Persiapannya sudah hampir tuntas. Kita sudah menyiapkan administrasi seperti surat dan SK. Sarana dan prasarana juga sudah mulai kita siapkan. Mudah-mudahan lancar," harap Win. ■



Suasana Rapat Koordinasi Sekjen DPR dengan MPR dan DPD

(ann.mpr), Foto: Rami/ivo

Sarana Prasarana Pendidikan P4TK Sumut Buruk Akibat Rendahnya Anggaran Pendidikan

Kondisi sarana prasarana pendidikan di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik (P4TK BBL) di Medan, Sumatera Utara dinilai buruk oleh Komisi X DPR RI.

Kondisi tersebut menurut Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X ke Sumatera Utara Sutan Adil Hendra sebagai salah satu akibat rendahnya anggaran pendidikan.

"Kurangannya anggaran (pendidikan) mengakibatkan kondisi-kondisi sarana prasarana pendidikan buruk dan SDM kurang memadai,"

kata Sutan kepada Parlemen saat meninjau P4TK BBL di Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/07)

Menurut politisi Gerindra ini, jika bicara menata suatu pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari adanya sarana dan fasilitasnya, SDMnya dan manajemennya. Karena itu ini merupakan suatu kebutuhan daripada pendidikan kita.



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau P4TK BBL di Medan

Pendidikan semestinya, tandas Sutan, menjadi skala prioritas. Oleh karena itu, tegasnya, Komisi X DPR RI akan berjuang terus untuk meningkatkan anggaran pendidikan.

Adanya pemotongan anggaran pendidikan dalam APBNP 2016 sangat disesalkan politisi Gerindra ini. "Oleh karenanya ke depan kita ingin pemerintah

Bidang Bangunan dan Listrik. "Bayangkan kalau ini menjadi sesuatu pabrik dalam bidang bangunan dan listrik namun peralatannya sungguh memprihatinkan, bagaimana mereka mempunyai SDM, bagaimana mereka mempunyai kemampuan sementara peralatan untuk mereka mendapatkan ilmu itu tidak ada," tukasnya. ■

(se), Foto: Suci/br

Anggota DPR RI Berharap Istri Politisi Turut Serta Bantu Masyarakat

Anggota Komisi III DPR RI, Setya Novanto berharap istri politisi dapat turut serta membantu masyarakat melalui program-program sosialnya. Hal tersebut diungkapkannya usai melantik kepengurusan Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) di Aula Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (25/7).

“ Babak baru bagi Partai Golkar dalam mewujudkan Suara Golkar Suara Rakyat. Kini secara formal, bukan saja Fungsi Partai yang turun merapat ke rakyat, tapi para pendamping Fungsi Partai dalam hal ini organisasi Ikatan Istri Partai Golkar pun turun langsung,” kata Setya Novanto. Tidak hanya itu, ia juga berharap agar istri politisi lainnya

pun dapat membantu masyarakat melalui program-program sosialnya.

Sementara itu, Ketua umum IIPG, Deisti Novanto mengatakan bahwa pihaknya bersama-sama telah menyusun berbagai program satu tahunan dan program jangka panjang. Salah satunya program pelatihan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat ekonomi kreatif. Tujuannya tak lain untuk mengangkat



Anggota Komisi III DPR RI Setya Novanto

ekonomi kerakyatan sehingga akan membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Pada kesempatan itu juga

Tiga Hal Jadi Penghambat Tak Tercapainya Target Penerimaan Pajak 2015

Menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPR RI yang mempertanyakan tidak tercapainya target penerimaan perpajakan tahun 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh tiga hal. Ketiga hal itu adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2015, harga CPO yang sangat rendah di pasar internasional dan harga komoditas mineral yang mengalami penurunan sepanjang 2015.

Hal itu dikemukakannya dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Senin (25/07). Meskipun begitu, Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang mencapai 4,8 persen merupakan pertumbuhan yang relatif baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1 persen. Sebagaimana diketahui, perekonomian global mengalami moderasi yang ditandai dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi beberapa negara maju dan perlambatan di negara mitra dagang utama.

diluncurkan kartu Komunitas tiga fungsi utama, yaitu sebagai tanda keanggotaan komunitas yang telah berinteraksi dengan IIPG, mengakses program-program IIPG, dan sebagai kartu *discount* di beberapa *merchant* atau toko.

Terkait dengan isu sosial pelecehan dan kekerasan terhadap anak, Deisti juga mengaku bahwa IIPG akan turut membantu pemerintah menyosialisasikan perlindungan terhadap anak dari para pelaku kejahatan terhadap anak. Bahkan, ia juga turut mendukung penuh wacana hukuman kebiri yang akan dikenakan pada pelaku kejahatan dan kekerasan seksual terhadap anak.

"Saat ini kan wacana hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak masih pro dan kontra. Namun saya pribadi mendukung penuh hal itu jika memang cara itu bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan akhirnya mengurangi terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Isu perlindungan anak inipun akan terus menjadi sosialisasi kami selain program-program sosial IIPG lainnya," papar Deisti. ■

(gny), Foto: iwan/br



Suasana Rapat Paripurna DPR RI

Dalam penjelasannya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua fraksi di DPR RI atas masukan yang disampaikan pada pemerintah pada Rapat Paripurna sebelumnya yang membahas RUU Pertanggungjawaban Keuangan dalam APBN 2015.

"Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua fraksi di DPR RI atas pandangan, pendapat, masukan, saran maupun apresiasi kepada pemerintah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR

RI tanggal 20 Juli 2016 lalu," ujar Bambang.

Pandangan dari fraksi-fraksi DPR RI, kata Menkeu menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. "Pandangan dari fraksi-fraksi DPR RI menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara," sambungnya.

Pemerintah juga menyambut baik persetujuan seluruh fraksi di DPR RI untuk membahas R UU

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015 pada tahap selanjutnya. "Pemerintah juga menyambut baik persetujuan seluruh fraksi DPR RI untuk membahas R UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015 pada tahap selanjutnya," jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan yang memimpin Rapat Paripurna ini menjelaskan nantinya RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015 akan dibahas melalui Badan Anggaran DPR RI. Politisi PAN ini juga mengatakan, penetapan dan pembahasan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2015 ini dilakukan paling lama tiga bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ke DPR RI. ■

(br.mpi), Foto: Azka/br

Beredarnya Kartu BPJS Palsu Akibat Sosialisasi yang Minim

Beredarnya kartu BPJS palsu di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, jadi koreksi tersendiri bagi BPJS sebagai penyelenggara jaminan kesehatan. Sosialisasi yang selama ini minim sejak diluncurkan menimbulkan banyak akibat. Salah satunya adalah beredar kartu BPJS palsu di masyarakat.

“Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati dalam rilisnya yang diterima Parlemen, Senin (25/7). "Munculnya kartu BPJS palsu ini merupakan dampak dari sosialisasi yang tidak paripurna di masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang prosedur pendaftaran BPJS. Kondisi ini harus menjadi catatan serius bagi manajemen BPJS untuk melakukan pembenahan dan perbaikan.”

Menurut Sekretaris Dewan Pakar DPP PPP tersebut, terungkapnya kartu BPJS palsu ini merupakan masalah serius sekaligus jadi bahan koreksi bagi manajemen BPJS. Kinerja Dewan Pengawas (Dewas) BPJS, sambung Okky lagi, juga dinilai tidak maksimal. Dewas pun diimbau agar meningkatkan perannya.

"Peristiwa ini menunjukkan kinerja Dewas BPJS tidak maksimal. Komitmen Dewas BPJS yang bakal bekerja maksimal saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, tidak dibuktikan dengan munculnya kartu BPJS palsu. Ke depan, Dewas BPJS agar lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan. Dewas BPJS harus memastikan ke depan tidak ada lagi kasus serupa muncul di lapangan," seru Okky.

BPJS juga diharapkan segera mengecek peredaran kartu palsu tersebut agar tidak terus merugikan masyarakat. Karena ada peristiwa ini, Okky justru mengusulkan agar

anggaran negara untuk BPJS dipisahkan dari anggaran Kemenkes yang selama ini masih menyatu. Pemisahan ini diharapkan bisa dimulai pada APBN 2017 mendatang. ■



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati

(mb), Foto: Jaka/br

Komisi X DPR RI Prihatin Lihat Kondisi P4TK BBL di Sumatera Utara

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menyatakan prihatin melihat kondisi sarana dan prasarana di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik (P4TK BBL) di Medan, Sumatera Utara.

“Menjadi skala prioritas bagi Komisi X DPR RI dalam hal melihat bagaimana sarana dan prasarana pendidikan, karena kita ingin betul anak-anak kita ke depan mempunyai skill yang bisa bersaing dengan negara-negara lain. Namun ternyata setelah kita melakukan peninjauan ke P4TK BBL ini kondisinya sangat memprihatinkan,” kata Sutan disela-sela kunjungan Tim Komisi X ke P4TK BBL di Sumatera Utara, Jumat (22/7).

Setelah diperhatikan, tandas Sutan yang juga Ketua Tim Kunjungan Komisi X ke Sumatera Utara ini, sarana dan prasarana pendidikan di P4TK BL ini

seperti meja dan kursi untuk praktek saja ia yakin sudah dari zaman Belanda.

Tidak itu saja, ia melihat, peralatan-peralatan untuk praktek pun yang diterima P4TK BL



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau P4TK BBL di Sumatera Utara

terakhir tahun 1980an. "Bayangkan, komputer saja masih ada komputer kodok mungkin usianya sudah 35 tahun. Sementara sekarang ini, yang namanya teknologi jika tidak terus *update* kita akan ketinggalan jaman," papar politisi dari Partai Gerindra ini.

Sementara, tambah Sutan, saat ini kita sudah berada di MEA tentunya kalau *skill* daripada anak-anak kita ke depan tidak mempunyai kualitas, anak-

anak kita atau generasi berikutnya bukan hanya numpang di negara sendiri bahkan akan terusir.

"Oleh karena itu menjadi suatu catatan bagi Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan ini, tapi ini semua adalah langkah kita untuk menciptakan SDM kita yang berkualitas. Kami berjanji akan memperjuangkan ini, agar mutu kualitas dan *skill* anak-anak kita ke depan bisa menjadi lebih baik", mantapnya.

Keberadaan P4TK BL, menurut Sutan adalah sesuatu yang harus terus dilakukan karena ini adalah pabrik SDM bagi tenaga pendidik di SMK. "Jika keterampilan itu tidak didukung oleh yang memberikan pembelajaran bagi mereka karena pabriknya di sini, bagaimana mereka mau menurunkan ilmu keterampilan itu," ungkapnya. ■

(sc), Foto : Sutan/hr

Perluasan Kesempatan Kerja Menjadi Prioritas RAPBN dan RKP 2017

Badan Anggaran DPR RI menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2017 pada Rapat Paripurna ke - 34. Laporan ini disampaikan Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir. Dalam pidatonya dia menjelaskan pokok-pokok pembahasan tentang RAPBN 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

“Berikut kami sampaikan pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN 2017 dan RKP tahun 2017,” papar Kahar dalam pidatonya di hadapan para anggota dewan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/7).

Pada RAPBN dan RKP 2017, DPR RI melalui Banggar menitik beratkan pada perluasan kesempatan kerja, dengan begitu diharapkan dapat berimplikasi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. DPR dan pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan ada pada kisaran 9,5 sampai 10,5 persen.

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga memaparkan bahwa tema RKP 2017 adalah, 'Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah'.

Terkait strategi yang disusun DPR dengan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan terdiri dari empat sektor prioritas. Pertama, pembangunan manusia dan



Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir

masyarakat. Kedua, pembangunan sektor unggulan seperti kedaulatan pangan, maritim, kelautan, pariwisata dan lain sebagainya. Ketiga, pemerataan dan kewilayahan pembangunan daerah tertinggal. Keempat, pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Anggota Dewan dari dapil Sumatera Selatan I ini menjelaskan, pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan di tahun 2017, sangat

dipengaruhi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan perluasan kesempatan kerja. "Dibutuhkan kesempatan kerja baru yang berkualitas, untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja sebesar 300.000, sehingga TPT berada pada kisaran 5,3 hingga 5,6 persen," jelas Kahar.

Sebelum menyampaikan laporan mengenai hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP, terlebih dahulu Banggar telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia pada 6 Juni sampai dengan 20 Juli 2016.

Dalam pembahasan itu disepakati untuk membentuk empat panitia kerja, yaitu Panja Asumsi Dasar, Panja RKP dan Prioritas Anggaran 2017, Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2017, dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN 2017. ■

(db), Foto : Jakarta/hr

Manajemen Tak Penuhi Hak Pilot, Serikat Pekerja Pilot Lion Air Mengadu ke DPR RI

Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/7) menerima serikat pekerja pilot Lion Air untuk mengadukan manajemen maskapai tersebut yang dinilai tak memenuhi hak-hak ketenagakerjaan.

Menurut Ketua Serikat Pekerja Pilot Lion Air, Mario T Hasiholan menjelaskan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan manajemen Lion Air, misalnya kontrak kerja yang melanggar aturan, pemalsuan data BPJS Karyawan, waktu kerja yang tidak jelas, serta waktu istirahat yang seringkali diganggu.

Selain itu, lanjutnya, terlambatnya pemberian uang transportasi pilot juga menjadi salah satu masalah yang sudah berlarut-larut. "Kami menuntut banyak hal dan sudah dilakukan banyak pertemuan dengan mereka (manajemen)," kata Mario.

Namun, tambah Mario, sejauh ini belum ada jawaban yang memuaskan dari Lion Air. Mario juga mengatakan bahwa proses ini sudah berjalan sejak lama. Karena tak kunjung menemui jalan keluar, para pilot yang terdiri dari 117 orang, sepakat membuat Perjanjian Kerja Bersama. Namun menurut Mario respon dari pihak manterial Lion tidak seperti yang diharapkan.

"Kami malah dilaporkan ke polisi, dikatakan pencemaran nama baik, dan tidak ditugaskan terbang lagi," terangnya.

Saat ini, berdasarkan informasi serikat pekerja pilot Lion Air, ada sekitar 20 orang pilot dilarang terbang. Padahal seorang pilot ditargetkan harus terbang setidaknya selama 90 hari, karena jika tidak, maka lisensi terbangnya akan mati.

Menanggapi hal ini anggota Komisi IX Irma Suryani mengatakan komisi IX akan mencermati kasus yang disampaikan oleh pilot Lion Air, yang meminta agar haknya dipenuhi oleh manajemen dan diketahui juga kalau kasus ini sudah

terjadi lama tanpa ada penyelesaian.

"Karena kasus ini sudah lama dan tidak bisa diselesaikan, jadi wajar saja kalau kemudian mereka datang dan mengadu ke komisi IX," ujar Irma usai pertemuan.

Lebih lanjut politisi partai

Nasdem ini

mengatakan

kondisi pilot Lion

Air harus

menjadi

perhatian,

karena

menurutnya

pilot tidak

boleh membawa



Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani

pesawat dalam kondisi tertekan.

"Pilot tidak boleh membawa pesawat dalam kondisi tertekan karena yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Saya teringat kembali ketika ada pilot yang nyabu dan beberapa kejadian yang kemarin kita dengar di media saya jadi berfikir apakah ini merupakan implikasi karena adanya penekanan dan intimidasi," ujar Irma.

Dari hasil laporan ini, komisi IX kata Irma akan melakukan investigasi dan akan memanggil kembali manajemen Lion Air yang tidak hadir untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut.

"Saya berharap semua institusi terkait bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah dan jangan menyepikan apa yang menjadi tanggung jawab. Apalagi yang panggil kami Wakil Rakyat, kami hanya mau menyelesaikan masalah dari rakyat dan institusi tempat mereka (pilot) bekerja," tuturnya. ■

Komisi X Tinjau Bengkel Guru dan Tenaga Pendidikan

Komisi X DPR RI mengunjungi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan (P4TK) Bidang Mesin dan Teknik Industri (BMTI) Jawa Barat, Jl. Pasantren KM. 2, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Jawa Barat.

Kunjungan ini untuk mengetahui kendala serta strategi teknis P4TK melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

"P4TK adalah bengkel guru dan bengkel tenaga pendidikan, yang diharapkan bengkel ini dapat menghasilkan guru dan tenaga pendidik yang handal," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah (bidang pendidikan), saat memimpin kunjungan spesifik, Jumat (22/7).

Komisi X juga mengharapkan kebijakan strategis dan teknis yang dilakukan P4TK dalam

UU Paten, Secercah Cahaya Angkat Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Pansus RUU Paten John Kennedy Azis menyatakan, ketika hasil bumi dan tambang menurun, minyak bumi juga tidak kunjung meningkat, RUU Paten adalah suatu cahaya yang akan mengangkat pertumbuhan ekonomi ke depan. Mudah-mudahan dengan UU Paten ini pula bisa membangkitkan perekonomian nasional sebagai pengganti hasil bumi yang akhir-akhir ini belum bisa banyak diharapkan.

Hal itu dikatakannya, di sela-sela memimpin Raker Pansus RUU Paten dengan Menkumham Yasonna H. Laoly dan Menristekdikti M. Nasir, Selasa (26/7) dengan agenda pengesahan RUU Paten hasil kerja Panja untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

Dalam sambutannya, Menkumham Yasonna H. Laoly menyatakan persetujuan DPR RI atas RUU Paten merupakan hadiah terbaik untuk para inventor nasional, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Selain itu untuk melindungi invensi anak bangsa, sumber daya genetik dan memajukan kesejahteraan rakyat melalui pembuatan paten.

Dikatakan, ekonomi nasional yang selama ini tergantung pada sumber daya alam (SDA) di tengah-tengah persoalan ekonomi dunia yang sangat melambat

lantaran harga komoditas SDA sangat rendah, maka saatnya kita kembali kepada potensi sumber daya manusia (SDM). Potensi SDM sangat besar antara lain melalui invensi-kemampuan anak-anak bangsa. " Prestasi anak-anak Indonesia mengikuti lomba Olimpiade seperti pembuatan robotik itu harus kita lindungi," tegas Laoly.

Dengan UU Paten ini dia berharap, perguruan tinggi, badan-badan penelitian dan perusahaan-perusahaan akan berlomba-lomba untuk membuat invensi



Ketua Pansus RUU Paten John Kennedy Azis

yang berguna bagi pengembangan teknologi yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi.

Hal yang sama dikatakan Menristek- dikti M. Nasir dengan berharap, dengan disetujuinya RUU Paten ini akan mencerahkan bangsa Indonesia. Dia mengakui, pada tahun 2015 mempelajari banyak paten yang didapatkan para inventor dan para innovator, tetapi tidak bisa memberikan

kebahagiaan pada inventor itu sendiri.

Bahkan dia mengajukan kepada Menkeu bagaimana royalti yang bisa diperoleh dapat dimanfaatkan oleh para inventor yang menggunakan *brands* dimana mereka menghasilkan inovasi. Sehingga hari ini merupakan hari bersejarah bagi kita dan peneliti dengan disahkannya UU Paten baru. Minggu lalu dia mengumpulkan 40 inventor dengan pelatihan inkubasi bisnis teknologi berbagai bidang diantaranya *food and agriculture, information and technology*.

"Sore ini saya menyampaikan terima kasih pada Pansus yang menyetujui RUU Paten. Semoga menjadikan kebahagiaan bagi para peneliti, inventor dan inovator. Dari Kemenku juga sudah dikeluarkan Peraturan Menteri (PMK) No. 106, dimana sebelumnya riset berbasis *actifity*, maka sekarang riset *by outputnya*, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan mereka," tutup M Nasir. ■



Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau P4TK dan Teknik Industri (BMTI) di Jawa Barat

peningkatan kompetensi dan sistem informasi kompetensi, serta distribusi kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan dapat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan persaingan global.

dan Kebudayaan yang memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Permendikbud No.41 Tahun 2012 dan Permendikbud No.34 Tahun 2013.

P4TK memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan bidangnya. ■

(as) Foto: Agung/br

(mp), Foto: Arif/br

Panja MEA BKSAP DPR RI Minta FTZ Diperluas Hingga Daerah Perbatasan

Pembentukan Panitia Kerja Masyarakat Ekonomi Asean (Panja MEA) oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI merupakan kontribusi terhadap penyusunan strategi nasional terkait MEA. "Kami melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen menjadi ujung tombak dalam diplomasi parlemen, untuk mengadvokasi dan mensosialisasikan kepentingan Indonesia dalam kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN.

Tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia kepentingan bangsa dan negara yang sama-sama kita cinta ini," ujar Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat mendampingi Tim Panja MEA DPR RI melakukan kunjungan kerja di Pekanbaru Riau, Rabu (27/7).

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim dalam pertemuan ini mengungkapkan, sebenarnya Pemkab Kepulauan Meranti telah berulang kali mengusulkan diri sebagai daerah perdagangan bebas.

Namun, hingga saat ini pemerintah pusat belum juga menanggapi usulan tersebut, padahal daerahnya yang dekat dengan

Singapura dan Malaysia ini mengalami banyak kesulitan khususnya dalam transaksi ekonomi dan perdagangan.

Menindaklanjuti hal tersebut Panja MEA BKSAP akan merekomendasikan Kabupaten Kepulauan Meranti agar masuk dalam kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Tetapi di sisi lain Juliari mengingatkan bahwa sebaiknya pemerintah daerah jangan sepenuhnya bergantung dengan pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat tentunya sudah punya program kerja kementerian-kementerian terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN Tetapi kalau saya lihat harusnya pemerintah daerah provinsi dan Daerah Tingkat II juga tidak boleh terlalu tergantung pada pemerintah pusat, mereka harus jaga anggaran yang mereka miliki itu benar-benar digunakan untuk peningkatan kualitas SDM, bukan hanya habis untuk birokrasi" jelas Politisi PDIP yang akrab dipanggil Ari ini. ■



Tim Kunker Panja MEA saat berdialog dengan Pemprov Riau dan sejumlah Kepala Daerah TK II

(ray) Foto: Rizka/mr.

Tulis Nama Merek Dagang Obat di Resep Dinilai Tendensius

Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengatakan kebiasaan dokter selama ini menuliskan nama merk dagang obat di setiap resep seharusnya diganti dengan pencantuman kandungan obat yang dibutuhkan pasien.

“ Kalau bisa kita akan buat aturan dokter tidak menulis resep nama obat, tetapi generiknya. Kalau sakitnya pusing, dikasih paracetamol bukan nama obat. Kalau memang tidak ada sangkut pautnya dengan produk, ya tulis saja generiknya” ungkap Dede dalam Dialektika Demokrasi di

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pasien harus punya hak untuk memilih dan mengetahui apa yang harus dia konsumsi, sehingga nanti ada fungsi Apoteker yang berjalan. Menurutnya, Apotekerlah yang akan menjelaskan obat tersebut ada generiknya atau importnya sehingga pasien berhak untuk



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf

memilih. "Jadi kita nggak langsung disodori rupiah dalam jumlah besar misalkan Rp300 ribu, pasien langsung kaget," tandas Dede.

Ia juga menilai, Pemerintah kurang sosialisasi kepada masyarakat bahwa tidak ada perbedaan kandungan obat paten maupun generik. "Kalau pemerintah sosialisasi obat generik, maka semua akan pakai obat generik," katanya.

"Obat paten artinya *bercopy-right* atau memiliki hak cipta, membayar royalti kepada penemu obat. Sedangkan obat generik hak patennya sudah selesai, tinggal menggunakan turunannya, makanya murah," jelas Dede.

Tidak hanya itu, Dede juga mengungkapkan masih banyak orang tua yang tidak mengetahui adanya vaksin yang dibuat pemerintah.

Pemerintah setiap hari memproduksi puluhan juta vaksin untuk anak usia dibawah 13 tahun.

"Kalau di RS Pemerintah yang dipakai adalah vaksin ini, yang gratis. Tapi kalau di RS Swasta kadang-kadang vaksin ini tidak dipromosikan padahal barangnya ada, sehingga yang selalu dikatakan kosong adalah vaksin impor," imbuh politisi dari dapil Jawa Barat II itu. ■

(amm.mp), foto: Andri/bi.

Komisi VIII Kunjungi MTsN dan MAN Model Makassar

Tim Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Makassar Jl AP Pettarani, Jum'at (22/7). Wakil Ketua Komisi VIII, Deding Ishak mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan kerja spesifik di tiga provinsi, salah satunya di Sulsel untuk mengetahui persiapan sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag, baik secara fisik ataupun infrastrukturnya.

“Kunjungan ini untuk mengecek fasilitas sarana dan prasarana sekolah MTsN dan MAN di setiap daerah,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII, Deding Ishak. Selain itu, pihaknya juga ingin mendengar langsung aspirasi dari para pihak MTsN dan MAN serta meminta laporan sarana dan infrastruktur apa yang di butuhkan sekolah terutama sekolah yang berkarakter (agama), dengan pendidikan berkualitas.



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI mengunjungi MTsN dan MAN Model di Makassar

Dalam penerimaan siswa siswi MTsN dan MAN berbeda dengan sekolah umum yang hanya menerima siswa yang lulusan Makassar saja, sedangkan MTsN Model Makassar menampung siswa dari lulusan mana saja dengan catatan harus mengikuti persyaratan yang ada. Persyaratan untuk masuk di sekolah dalam naungan Kementerian Agama tersebut, harus memiliki *Passing Grade 8* (delapan), dan pintar mengaji.

Apabila kedua syarat ini sudah dipenuhi maka calon siswa dinyatakan lulus sebagai pendaftar dan mendapatkan nomor tes untuk ikut dalam tes selanjutnya, sedangkan tes selanjutnya akan menjalani tes pengetahuan umum, dan ilmu keagamaan.

"Tapi yang paling utama dalam penerimaan siswa di MTsN Model, harus pintar mengaji, kenapa mesti pintar kalau tidak bisa mengaji apalagi ini sekolah di bawah aturan Kementerian Agama," jelas Kepsek MTsN Model Abdul Rafik.

di ajang lomba yang akan datang.

Dalam kunjungan yang dipimpin Deding Ishak ini ikut serta sejumlah anggota Komisi VIII di antaranya Samsu Niang, Achmad Mustaqim, Amrullah Amri Tuasikal, Desy Ratnasari, Arzeti Bilbina, dan Ruskati Ali Baal. Mereka disambut oleh Kepala Kemenag Sulsel Abdul Wahid Tahir, Kepala Sekolah MTsN Model Abdul Rafik, beserta pejabat Kemenag Sulsel. ■

Rafik menambahkan, tahun ini yang berminat mendaftar ke MTsN model 2.500 orang sedangkan yang di terima sebanyak 400 siswa siswi, dan ia berharap semoga siswa yang di terima bisa memberikan prestasi dan membawa nama baik MTsN Model

(Andri/bi), Foto: Andri/bi

Komisi VIII Apresiasi Kualitas Pembelajaran MAN 3 DIY

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik (Kunspek) ke Madrasah terpadu DIY Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta III, Madrasah Tsanawiyah Negeri Yogyakarta 1, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yogyakarta 1, Jumat (22/7).

Tim Kunspek yang diketuai M. Ali Taher dari (F-PAN) menggelar dialog dengan Kepala Kantor Wilayah Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nizar Ali, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Noor Hamid serta jajarannya dan perwakilan guru.

Setelah melakukan dialog tim Kunspek langsung meninjau sejumlah ruangan, di antaranya perpustakaan, ruang belajar mengajar dan berkesempatan langsung berbincang dengan perwakilan murid di MAN 3 DIY.

Menurut Ali Taher, tujuan Kunjungan Spesifik (Kunspek) untuk melihat secara langsung kondisi objektif dan permasalahan pengelolaan madrasah pada tahun ajaran baru 2016-2017, serta mendapatkan masukan mengenai kebijakan pengelolaan madrasah.

Ketua Tim Kunspek M. Ali Taher menyambut baik program-program sebagaimana disampaikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi termasuk persoalan yang dihadapi dan prestasi yang diraih. Menurutnya, MAN Yogyakarta 3 di DIY memiliki kualitas pembelajaran yang baik sehingga bisa mendapatkan bantuan dari program anggaran pendidikan Islam dalam APBN. Selain itu memiliki andil di bidang penyebaran Islam serta mempunyai prestasi dalam bidang Olimpiade IPA dan memiliki Perpustakaan yang menjadi rujukan nasional.

Lebih lanjut disampaikan, MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 3 Yogyakarta sebagai percontohan atau *role model* paling



Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI mengunjungi MAN 3 di Yogyakarta

tidak di kabupaten dan desa sehingga mempunyai prestasi dan percepatan yang bisa menjadikan lembaga-lembaga pendidikan Islam setara dengan pendidikan lain. Karena mempunyai keunggulan antara lain sikap, pemilihan akhlak, ilmu pengetahuan dan kemandirian.

Hal berbeda disampaikan anggota Komisi VIII Endang Maria Astuti yang masih miris ketika melihat selama ini perhatian Pemerintah khususnya terhadap sekolah-sekolah Islam sangat jauh dari layak di dibandingkan sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Sama-sama negeri hanya saja ini negeri yang nuansanya Islam dan negeri yang umum sangat jauh sekali.

Karena itu Komisi VIII akan memperjuangkan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan berharap Presiden Jokowi konsisten terhadap visi misi nyawa citanya, ada keberpihakan terhadap sekolah-sekolah yang bernuansa Islam yang di bawah naungan Kemenag dari tingkat bawah sampai atas. Sekolah-sekolah bernuansa agama Islam tidak bisa dipungkiri ikut membentuk karakter bangsa.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Najir Ali memberikan apresiasi atas kunjungan Komisi VIII ke MAN 3 Yogyakarta. Kunjungan ini memberikan manfaat dan bisa menyampaikan aspirasi serta menyampaikan berbagai harapan bagi kemajuan MAN 3.

madrasah di Jogjakarta menunjukkan era kebangkitan terbukti dari minat pendaftar yang sangat tinggi dengan rasio 3:1 (yang diterima 1 orang dari 3 pendaftar) di tahun depan di Programkan Madrasah menuju era keemasan.

Ditambahkannya untuk mencapai hal tersebut masih adanya kendala yaitu regulasi dan tambahan anggaran. "Sebanyak apapun kita mempunyai konsep, namun tidak didukung oleh anggaran tidak akan berjalan lancar maka dari itu meminta kepada Komisi VIII yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bencana agar bisa memberikan jalan terbaik," harapnya.

Kunjungan spesifik ini dikuti juga Itet Tridjayanti Sumariyanto, Erwin Moeslimin Singajuru, Jalaludin Rahkmat dan Mochammad Hasbi Asyidiki Jayabaya dari F-PDIP, Endang Maria Astuti, H. Zulfadhli dari F-Golkar, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (F-Gerindra), Dwi Astuti Wulandari dan Linda Megawati (F-Demokrat), H Kuswiyanto (F-PAN), H. An'im Falachuddin Mahrus (F-PKB), H.M. Iqbal Romzi (F-PPS), Muslich ZA (F-PPP) dan Choirul Muna (F-Nasdem). ■

(runimp). Foto: Ranti/br



Ketua Koperasi Setjen DPR RI Djazuli KS menerima penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM

Koperasi DPR RI Raih Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Award 2016

Menkop dan UKM AAGN Puspayoga didampingi Gubernur Jambi, Zumi Zola dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid menyerahkan penghargaan kepada 100 Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award Tahun 2016 serta 78 Penerima Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM.

Adapun Koperasi yang meraih penghargaan tersebut adalah 15 Koperasi Simpan Pinjam, 38 Koperasi Konsumen, 4 Koperasi Pemasaran, 12 Koperasi Produsen dan 21 Koperasi Jasa. 10 Koperasi yang mendapatkan Koperasi Award 2016 salahsatunya adalah Koperasi Setjen DPR RI.

Penyerahan Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award 2016 untuk Koperasi Setjen DPR RI diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM. Koperasi Setjen DPR RI mendapat urutan ke 4 dari 100 koperasi dalam peraih penghargaan Koperasi Berprestasi dan Award 2016 dari seluruh Indonesia, disaksikan oleh Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Koperasi ke-69 di Jambi, Kamis (21/7).

Ketua Koperasi Setjen DPR RI, Djazuli KS mengatakan, penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi untuk lebih baik lagi dalam mengelola koperasi sehingga dapat mensejahterakan anggotanya. "Ini dapat mensugesti kepada penerima penghargaan koperasi terbaik agar berbuat maksimal lagi,"

katanya.

"Kita berharap Koperasi dapat menjadi pilar utama dalam Koperasi Simpan Pinjam demi peningkatan kesejahteraan anggotanya, Ini bukan sebagai penghargaan tapi ini adalah cambuk untuk lebih meningkat lagi. Jangan sampai penghargaan membuat stagnan sebab masih banyak yang harus dikerjakan lagi," terang dia.

Menurut Djazuli, award itu terlebih karena manajemen. Yang pertama itu dari manajemennya sudah punya 2 ada manajer, yaitu manajer USP dan manajer sektor riil. Kemudian di tingkat manajer ke bawah ada 3 kepala bidang salah satu penilaian dan kemudian salah satu pengelolaan koperasi ditambah bendahara.

Selain itu, ada 9 unit usaha ada toserba, perdagangan kredit, pengadaan dan perawatan, pujasera, travel, percetakan *copy center*, cafeteria, minimarket Kalibata dan punya toko Tangerang City.

"Kita punya banyak sekali bidang usaha. Dalam pengelolaannya yang terpenting sekarang adalah kita sudah *online* itu salah satu kriterianya juga semua anggota bisa melihat simpanan atau cicilannya dan SHU nya. Melalui media komunikasi ini juga dibuka saran, kritik, dan masukan juga laporannya sudah secara *online*," imbuhnya. ■

(brmp)/foto: dak/br

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

[@dpr_ri](#)

[f DPR RI](#)

[@DPR_RI](#)

[DPR RI](#)



Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi sejumlah Wakil Ketua dan Anggota DPR RI meresmikan ruang rapat baru Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (28/7) Foto : Jaka,Andi

Kunjungan Kerja Panja MEA BKSAP DPR RI di Provinsi Riau melakukan pertemuan dengan Pemprov dan Pemda tingkat II di Kantor Gubernur dan mengunjungi galeri batik khas Riau di kota Pekanbaru, Rabu (27/7) Foto : Ray



Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari dan Anggota Komisi IX Irma Suryani dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema "Arah Politik dan Ekonomi Jokowi Pasca Reshuffle". Kamis(28/7) Foto: Andri